



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan meningkatnya nilai jual tanah maka besaran Nilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, penetapan Nilai Jual Objek Pajak dilakukan oleh Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;



- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
	

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3643) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:...

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kabupaten.
3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
4. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

BAB II
KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Klasifikasi NJOP terdiri atas:
 - a. NJOP Bumi; dan
 - b. NJOP Bangunan.
- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3...

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
	

Pasal 3

- (1) Besaran NJOP terdiri atas:
 - a. Besaran NJOP Bumi berupa tanah; dan
 - b. Besaran NJOP Bangunan.
- (2) Perhitungan Besaran NJOP Bumi berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan Besaran NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Pasal 4

Ketetapan PBB-P2 terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang wajib dibayar oleh wajib pajak paling sedikit Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BONDOWOSO




AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 80

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
	

Pasal 3

- (1) Besaran NJOP terdiri atas:
 - a. Besaran NJOP Bumi berupa tanah; dan
 - b. Besaran NJOP Bangunan.
- (2) Perhitungan Besaran NJOP Bumi berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan Besaran NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Pasal 4

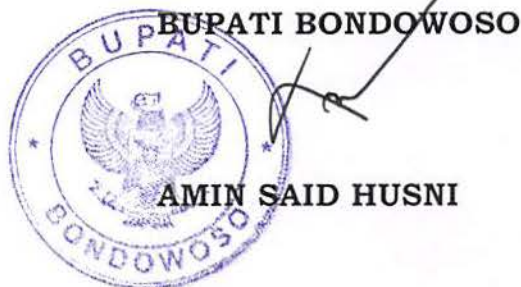
Ketetapan PBB-P2 terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang wajib dibayar oleh wajib pajak paling sedikit Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Desember 2017



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 80



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
 BONDOWOSO TAHUN 2018

KLASIFIKASI NJOP BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PEDESAAN
 DAN SEKTOR PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
1	2	3
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00



Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN
 BONDOWOSO TAHUN 2018

KLASIFIKASI NJOP BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PEDESAAN
 DAN SEKTOR PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
1	2	3
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00

1	2		3
038	> 10.040.000,00	s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00	s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00	s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00	s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00	s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00	s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00	s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00	s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00	s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00	s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00	s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00	s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00	s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00	s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00	s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00	s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00	s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00	s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00	s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00	s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00	s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00	s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00	s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00	s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00	s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00	s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00	s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00	s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00	s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00	s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00	s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00	s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00	s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00	s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00	s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00	s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00	s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00	s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00	s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00	s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00	s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00	s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00	s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00	s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00	s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00	s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00	s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00	s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00	s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00	s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00	s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00	s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00	s/d 4.100,00	3.500,00

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
	

1	2		3
091	> 2.000,00	s/d 2.900,00	2.450,00
092	>1.400,00	s/d 2.000,000	1.700,00
093	>1.050,00	s/d 1.400,00	1.200,00
094	>760,00	s/d 1.050,00	910,00
095	>550,00	s/d 760,00	660,00
096	>410,00	s/d 550,00	480,00
097	>310,00	s/d 410,00	350,00
098	>240,00	s/d 310,00	270,00
099	>170,00	s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	s/d	140,00







BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

1	2		3
091	> 2.000,00	s/d 2.900,00	2.450,00
092	>1.400,00	s/d 2.000,000	1.700,00
093	>1.050,00	s/d 1.400,00	1.200,00
094	>760,00	s/d 1.050,00	910,00
095	>550,00	s/d 760,00	660,00
096	>410,00	s/d 550,00	480,00
097	>310,00	s/d 410,00	350,00
098	>240,00	s/d 310,00	270,00
099	>170,00	s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	s/d	140,00

BUPATI BONDOWOSO

td  AMIN SAID HUSNI 

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
 2018

KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
1	2	3
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
<i>t</i>	<i>h</i>

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
 KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
 2018

KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
1	2	3
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00

1	2		3
037	> 74.000,00	s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00	s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00	s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00		50.000,00

BUPATI BONDOWOSO

te l **AMIN SAID HUSNI** *ep*

Paraf Koordinasi	
Kepala BAPENDA	Kabag. Hukum
<i>te</i>	<i>d</i>

1	2		3
037	> 74.000,00	s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00	s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00	s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00		50.000,00



BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI